**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK YANG
DIMILIKI LANJUT USIA (LANSIA) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA)
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh : Clara Izati Putri

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letjen Sparman No 53D

Email : claraizati07@gmail.com - Telepon : 081233404681

ABSTRACT

Increasing the number of elderly population (60 years and over) every year continues to increase. This condition causes many elderly people who experience social violence and violations of the rights of the elderly. One form of human rights violations possessed by the elderly is neglect by families, people around or the community who no longer pay attention to the elderly. This should receive special attention from the government in order to realize the welfare of the elderly as expected in Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare by providing social protection for the elderly. Social protection is a human right that is owned by every citizen. The government in particular has formulated various regulations aimed at the welfare of its people in Act Number 11 of 2009 concerning Social Welfare. But the fact is, until now there has not been formed a special role from the government in helping neglected elderly get their social welfare, so it can be said that legal protection for neglected elderly people in Indonesia is still vague. This type of research can be classified in normative juridical research, because this research is carried out by examining secondary data and approaches to the law, this normative study examines applicable regulations and relates to the human rights of the elderly. Source of data used are primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is literature study. The results of the study conducted by the author are the role of government or society in realizing the welfare of the elderly is still very weak. This is evidenced by the increasing number of neglect of the elderly themselves. Therefore, to realize the welfare of the elderly as expected by the welfare state (welfare state), the government must take concrete actions in fulfilling the elderly rights that have been regulated in Law No. 13 of 1998 concerning elderly welfare. In an effort to provide protection and fulfillment of the right to the elderly, the government must work extra. One of them is by updating the law governing the elderly so that it can be applied in modern times.

Keywords: *elderly, neglect of elderly, violation of elderly rights.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum telah tegas tercantum di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*The highest law*).¹ Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum secara konstitusional dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini, Indonesia telah dinobatkan sebagai Negara hukum demokratis atau *Democratic governance*.² acap dipahami atas tiga ruang yang dicakupnya: *Good governance*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

Pada masa modern ini seorang lanjut usia yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri keberadaannya dalam keluarga anak, dapat mengganggu kehidupan keluarga anak ekonominya, privasinya, kasih sayang yang terbagi, dan mungkin masalah kepengaruhannya rumah tangga karna turut campurnya orang tua dalam urusan keluarga anak.³

¹ Lihat, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

² Ahmad Syahrizal, *peradilan konstitusi suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normative*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2006. Hlm. 98

³ Singarimbun, Masri. 1988, *Pencapaian Program Keluarga Berencana*

Terungkapnya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak lansia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g berbunyi perlindungan sosial dan huruf h bantuan sosial Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) juga menjelaskan mengenai lanjut usia potensial dan tidak potensial yang mendapatkan dan tidak mendapatkan kemudahan terhadap hak-hak yang diatur didalam pasal 5 ayat (2). Tidak dijelaskannya lanjut usia potensial dan tidak potensial didalam undang-undang ini menyebabkan kekeliruan terhadap penafsiran pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merevisi undang-undang kesejahteraan lansia dan mengoptimalkan perlindungan terhadap lanjut usia

Menurut penulis Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap lanjut usia (lansia) yang ada di Indonesia. Undang-Undang tersebut membutuhkan beberapa pasal tambahan untuk melibatkan peran pemerintah daerah sehingga terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah dan perubahan-perubahan lain untuk mengoptimalkan aturan-aturan yang ada didalamnya. Selain karna

di Indonesia, Prisma, No. 3 tahun 2017, hlm. 3

Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang lama yang tidak ada pembaruan dari tahun ke tahun dan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut juga tidak tegas dalam melindungi hak hak yang dimiliki oleh masyarakat lansia di Indonesia.

Sehingga terjadilah masalah masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penelantaran terhadap lansia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul *“Tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak yang dimiliki lanjut usia (Lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia (Lansia) dalam perspektif Hak Asasi Manusia”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak yang dimiliki lanjut usia (lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah konsep ideal Tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak bagi lanjut usia (lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) guna mewujudkan negara kesejahteraan (Welfare State)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia (lansia) dan tanggung jawab Negara terhadap perlindungan hukum lansia.
- b. Untuk mengetahui bentuk ideal pengaturan Hukuman bagi pelaku pelanggaran hak hak asasi manusia yang dimiliki orang lanjut usia (lansia) di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di Negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum bagi

peningkatan penghormatan atas hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi yang berlandaskan pada keadilan, kebebasan serta kedamaian.⁴ Argumen lain menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam DUHAM mencerminkan nilai-nilai bangsa Eropa bukan bangsa Asia.⁵

Nilai-nilai HAM seharusnya diterapkan secara menyeluruh disegala lapisan masyarakat sehingga segala bentuk diskriminasi rasial, seksual dan abilitas benar-benar mendapat perhatian yang memadai, terutama terkait dengan perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi merendahkan harkat dan martabat.⁶ Di sisi lain pandangan awam yang terlalu menyederhanakan HAM perlu pula diluruskan⁷

2. Teori Negara Kesejahteraan (welfare state)

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya

negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan⁸

Negara kesejahteraan harus menjamin keadilan distributif bagi seluruh masyarakat. Keadilan distributif ialah menuntut pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di dalam masyarakat.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁰

⁴ Emilda Firdaus, "implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikota batam", *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, No1 Vol 21 Januari 2014, hlm139-154

⁵ Joyce Chia & Justin Susan Kenny, "The Children of Mae La: Reflection on Regional Rulligee Cooperation" *Melbourine Journal of international law*, Vol 13 No.3 November 2012, hlm 845.

⁶ Herlina Lambert, "Protection Against Refonlement From Europe : Human Rights Law Comes to the Rescue", *Cambridge University Press*, Vol 48 Maret 2019, hlm 515., Diunduh dari: <https://1next.westlaw.com/document>.

⁷ Kurniawan kunto yuliarso "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: menuju Democratic governance" *jurnal ilmu sosial dan politik* vol, no 3 maret 2005 hlm 295.

⁸ Oman Sukmana, " Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)" *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 109

⁹ Dessy Artina, "Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau priode 2014-2019", *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.1 Vol 23 Januari 2016, Hlm 129

¹⁰ KBBI (kamus besar bahasa indonesia)

2. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat.
3. Hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Kemudian hukum yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.¹¹
4. Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh tahun) keatas.¹²
5. Undang-Undang adalah suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden yang aturannya mengikat seluruh warga Negara Indonesia.
6. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹³

¹¹ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 107

¹² Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut usia

¹³ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya menemukan-kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁵ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta

Sosial Budaya, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan: 2007, hlm. 7

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47

¹⁵ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta: 2014. Hlm 47

¹⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.133

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁷ Bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia (lansia).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.¹⁸

3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.¹⁹ Bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia dan

sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁰

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.²¹ Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²² Yakni pemaparan kembali dengan kalimat

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47

¹⁸ Burhan Ashshofa, *metode penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 50

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta :2002, hlm 50

²¹ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm.20-21

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010,,hlm.32

yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.

Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dengan penarikan suatu-kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²³

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun arti dari analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam sebuah peraturan perundang-undangan, literatur/buku, dan media massa.²⁴

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

1. Hubungan Negara dan Masyarakat

Negara dan masyarakat selalu dalam keadaan berinteraksi. Hubungan masyarakat dan Negara

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm 20

²⁴

<http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisisi-realibilitas-dan-validasi-dalam-metode-penelitian-komunikasi/20-12-20017>, diakses, tanggal, 01 Oktober 2019

dapat kita lihat disetiap sudut kehidupan, dari kelahiran hingga kematian seseorang. Bayi yang lahir memerlukan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Negara. Surat kelahiran ini akan mempermudah seseorang dalam mengurus surat surat penting, salah satunya untuk membuat KTP yang akan digunakan sebagai identitas seseorang. Begitu juga ketika seseorang telah meninggal dunia, seseorang itu juga masih harus berurusan dengan Negara. meskipun bukan orang yang bersangkutan yang akan menyelesaikan urusannya, tetapi keluarga harus melaporkan kematian orang tersebut dan dicatat oleh Negara.²⁵

Selain urusan-urusan administrasi, Negara menjalankan berbagai macam tugas, seperti menjaga ketertiban dan keamanan, menyelenggarakan perekonomian, menyelenggarakan pertahanan dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab Negara.²⁶

2. Tanggung jawab Negara

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. begitu juga Negara Indonesia yang bertanggung jawab melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat).

²⁵ I wibowo, *Negara dan masyarakat*, gramedia pustaka utama, Jakarta, 2000, Hlm 2.

²⁶ Ibid Hlm 3

Latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara (*state responsibility*) dalam hukum yaitu tidak ada satu pun dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di Negara lain. Hukum tentang tanggung jawab Negara adalah hukum mengenai kewajiban Negara yang timbul manakala Negara, telah atau tidak melakukan tindakan.²⁷

3. Tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan lanjut usia

Berkenaan dengan hal tersebut, amanah untuk melindungi kaum lansia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34 ayat 2 dan 3, bahwa :

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.²⁸

Sejalan dengan itu, secara lebih eksplisit Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, juga telah mengamankan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial

²⁷ Muhammad heikal daudy, "tanggung jawab Negara terhadap pelanggaran menyeluruh ranjau anti-personel di indonesia dalam konflik bersenjata di aceh" *jurnal ilmu hukum*, vol.2, no 60, agustus 2013, hlm 252.

²⁸ UUD 1945 Pasal 32 ayat 2 dan 3.

kepada penduduk lanjut usia yang bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

B. Tinjauan Umum Lanjut Usia

1. Pengerian lanjut usia dan lanjut usia terlantar

Di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa yang disebut lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.³⁰ Pengertian ini telah menjadi pengertian umum tentang lanjut usia.

Lanjut usia terlantar merupakan lansia yang mengalami hambatan dan menikmati masa tuanya karena faktor-faktor dari keluarga dan lingkungannya.

2. Standar Pelayanan Sosial dalam Panti jompo

Pelayanan sosial bagi lansia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang mayoritas sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kondisi fisik yang semakin lemah terlebih bagi lansia yang tergolong dalam kategori terlantar. Implementasi pelayanan sosial bagi lansia terlantar

²⁹ UU RI No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

³⁰ Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

merupakan wujud nyata agar kesejahteraan sosial terwujud.

Pelayanan sosial dalam panti bagi lansia terlantar merupakan bentuk sistem pelayanan sosial atau sebagai *primary setting*. Pelayanan sosial yang diberikan sebagai jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat sebagai akibat perubahan masyarakat sendiri. Pelayanan sosial dalam panti mempunyai tujuan agar lansia terpenuhi kebutuhan hidup, di hari tuanya dalam keadaan tenang lahir dan batin, dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat, dan mandiri.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama manusia.³²

Di Indonesia sendiri, kebangkitan kepedulian terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia di kalangan khalayak, kaum

intelektual, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah merupakan suatu gejala yang wajar sehubungan dengan faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada persepsi dan realisasi hak-hak manusia, yaitu tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya.

3. Hak Asasi Warga Negara dan Hak Asasi Lanjut Usia Di Indonesia

Lansia memiliki kebutuhan sebagaimana individu pada umumnya, yaitu kebutuhan dasar, psikis, sosial, dan spiritual. Kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan.

Perlindungan Sosial Lansia Terlantar dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak lansia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia setiap orang memiliki kebutuhan hidup.³³ Hak-hak yang dimiliki lanjut usia telah tertuang didalam pasal 5 ayat (1) sampai (4) UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak yang Di miliki Lanjut Usia (Lansia) Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

³³ Lia Shafira Arlianty dkk, "Analisis Relevansi Program Dan Pelaksanaan Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung", *Jurnal FamilyEdu*, Vol 1, No 1, April 2015, Hlm 9.

³¹ Elly Kuntjorowati, "Nyaman dan Tenang di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Comfortable and Peaceful at Budi Dharma ElderlyHome Service", *jurnal PKS*, vol 16, No 2, juni 2017, hlm 212.

³² Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif Islam; menyingkap persamaan dan perbedaan antara islam dan barat*, Edisi pertama, salemba diniyyah, Jakarta, 2003, hlm 20.

tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kondisi lanjut usia yang berisiko, salah satunya kesehatan yang menurun menyebabkan lanjut usia memerlukan perhatian terhadap kesehatannya. Namun kebutuhan lanjut usia tidak hanya sebatas perawatan medis atau kesehatan saja, melainkan kebutuhan sosial, ekonomi serta kebutuhan psikologis harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan fisik dan mental ini perlu dijaga agar lanjut usia selalu merasa dalam kesehatan fisik dan mental yang baik.³⁴

Negara Indonesia dalam memenuhi hak-hak lansia demi meningkatkan kesejahteraan lanjut usia bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia. Perlindungan bagi lansia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu perlindungan keuangan, perlindungan non-keuangan, dan *active aging*.³⁵ Namun kesejahteraan manusia lanjut usia telah menjadi masalah yang harus mendapat perhatian pemerintah, harus adanya kebijakan sosial yang berpihak kepada lansia, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu tanggung jawab Negara terhadap lanjut usia adalah dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki lanjut usia tersebut. Di Indonesia, hak asasi dan martabat

warga secara legal mendapat tempat yang terpandang dan dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 secara kukuh dan teduh menempatkan lansia dalam perlindungan dan pemenuhan kebutuhan. Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”.³⁶

Penelantaran terhadap lanjut usia ini jelas telah melanggar hak-hak lansia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menjelaskan mengenai jaminan sosial terhadap lanjut usia, antara lain dalam Pasal 41, dan 42. Pada Pasal 41 ayat 1 dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Pada ayat 2 undang-undang ini menyatakan setiap, orang yang berusia lanjut, penyandang disabilitas, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pada kenyataannya perlindungan terhadap hak-hak lanjut usia belum terpenuhi sehingga masih banyaknya kasus-kasus penelantaran dan pelanggaran HAM terhadap lanjut usia. Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia merupakan undang-undang lama yang juga

³⁴ Dwi Sarbini dkk, *Gizi Geriatri*, Muhammadiyah university press, Surakarta, 2019, Hlm 7.

³⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm 55.

³⁶ Indang Trihandini, “Potret Buram Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Indonesia”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 1, No 5, april 2007, hlm 227.

menjadi salah satu faktor lemahnya perlindungan terhadap lansia. Hal ini yang menjadi ide pokok pemikiran peneliti agar menuangkan ide serta solusi yang mana seharusnya Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang dimiliki lanjut usia melalui tindakan nyata dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat dalam melindungi lanjut usia.

B. Konsep ideal Tanggung jawab Negara terhadap perlindungan hukum bagi lanjut usia (lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) guna mewujudkan Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Salah satu tanggung jawab Negara untuk mewujudkan Negara kesejahteraan adalah dengan cara memenuhi hak-hak lanjut usia yang telah tertulis didalam Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang akan menjamin pemenuhan hak tersebut maka Negara telah memenuhi salah satu konsep Negara kesejahteraan.

Secara normatif harus diakui bahwa pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dalam menangani fenomena penuaan penduduk. Pada tahun 1998, pemerintah telah memberlakukan UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang keduanya merupakan landasan yuridis kuat dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Indonesia. Namun UU No.13 Tahun

1998 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian Indonesia apalagi dalam upaya mengantisipasi kondisi penduduk Lansia di waktu mendatang.

Kesejahteraan lanjut usia seharusnya tidak hanya menjadi fokus pemerintah pusat, namun juga menjadi fokus pemerintah daerah untuk menjamin kelangsungan hidup lansia disetiap daerahnya. Untuk itu, perlu adanya pasal dalam UU No 13 tahun 1998 yang memuat tentang peranan pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan lansia didaerahnya. Hal ini diperlukan untuk mengontrol keadaan lansia disetiap daerah, karna perkembangan lanjut usia yang semakin meningkat.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin meningkat utamanya lanjut usia, pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan layanan kesehatan, sandang dan pangan berdampak pada usia harapan hidup (UHH) semakin meningkat ini adalah sebuah keberhasilan pembangunan namun menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah sehingga diperlukan sebuah pembaharuan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dan hak-hak lanjut usia.

Banyaknya kekosongan hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap lanjut usia ini, menjadi ide utama penulis untuk menuangkan ide serta mengkaji kembali Konsep ideal Tanggung jawab Negara terhadap perlindungan hukum bagi lanjut usia (lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia (lansia) guna mewujudkan Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum bagi lanjut usia (lansia) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) dalam perspektif Hak Asasi Manusia, belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penelantaran dan kekerasan terhadap lanjut usia di Indonesia. Penelantaran terhadap lanjut usia merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi yang dimiliki lanjut usia, oleh karena itu seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap permasalahan lanjut usia ini. Belum adanya tindakan nyata dari pemerintah menyebabkan penelantaran terhadap lanjut usia ini semakin meningkat. Banyaknya kasus-kasus tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan permasalahan penelantaran lanjut usia ini.
2. Konsep ideal Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak yang dimiliki lanjut usia (lansia) guna mewujudkan negara kesejahteraan (*Welfare State*) memerlukan usaha yang sangat ekstra. Hal ini dikarenakan kondisi lansia di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Undang-Undang yang mengatur mengenai kesejahteraan lanjut usia merupakan Undang-Undang lama yang sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Banyaknya pasal-pasal yang harus di

sempurnakan dan perlunya penambahan beberapa pasal baru yang akan membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia. Beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang ini kaku dalam hal melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lansia. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya peraturan-peraturan yang tegas tentang kesejahteraan lansia baik peraturan daerah maupun peraturan-peraturan lain.

2. Saran

1. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kesejahteraan lanjut usia dan dilihat dari kondisi lanjut usia di Indonesia, seharusnya pemerintah lebih memberikan perhatian khusus terhadap keadaan lanjut usia yang ada. Dengan melihat pasal 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) pemerintah bertanggung jawab atas terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan terhadap lanjut usia. Perlunya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk terpenuhinya hak-hak yang dimiliki lanjut usia sebagaimana tertulis dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia).
2. Untuk memenuhi konsep ideal Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak yang dimiliki lanjut usia (lansia) guna mewujudkan

negara kesejahteraan (*Welfare State*) perlu dilakukan beberapa tindakan nyata dari pemerintah. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia). Hal ini perlu dilakukan karena UU tersebut merupakan UU lama yang sudah tidak relevan untuk digunakan saat sekarang. Perlunya perubahan dan penambahan beberapa pasal yang mengatur mengenai lanjut usia diindonesia. Seperti penambahan pasal yang melibatkan peranan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lansia. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya peraturan-peraturan yang tegas tentang kesejahteraan lansia baik peraturan daerah maupun peraturan-peraturan lain.

DAFTAR ISI

A. Buku

- A, Effendi, Masyhur, 1993, *hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Ghalia Indonesia, bogor
- A, Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007 “*HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*” Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Ali , Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asshofa, Burhan, 2010 “*Metode Penelitian Hukum*” Rineka Cipta, Jakarta
- Boere, C. George, 2008, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*: Jogjakarta, Prismashopie
- Demartoto, Argyo, 2006, “*Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia.*” Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Harper, Erica, 2009, *perlindungan hak-hak warga sipil dalam situasi bencana*, Grasindo, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung
- Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung
- Khomaeny, Elfan fanhas fatwa dan chandrawati, 2019, *pesan cinta untuk anakku*, Edu publisher, tasikmalaya
- Kosasih, Ahmad, 2003, *HAM dalam perspektif Islam; menyingkap persamaan dan perbedaan antara islam dan barat*, Edisi pertama, salemba diniyyah, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Mustafa, Bachsan , 1982, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung
- Mutakien, Raisul, 2006, *teori umum tentang hukum dan negara*, penerbit nusamedia, bandung
- P, David, forsythe, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, terj. Tom Gunadi, Angkasa, bandung
- Rasyad, Aslim, 2005, “*Metode Ilmiah: Persiaoran Bagi*

- Peneliti* UNRI Press, Pekanbaru
- Sarbini, Dwi, dkk, 2019, *Gizi Geriatri*, Muhammadiyah university press, Surakarta
- Singarimbun, Masri. 1988 “*Pencapaian Program Keluarga Berencana di Indonesia*”, prisma
- Soekanto, Soerjono, 2006, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke 2, UI Press, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis, 2014 “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*” Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta
- Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok
- Syahrizal, Ahmad, 2016, *peradilan konstitusi suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normative*, pradnya pramita, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, “*Penelitian Hukum dan Praktek*” Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Wibowo, I, 2000 *Negara dan masyarakat*, gamedia pustaka utama, Jakarta
- Administratum, Vol 4, No 2, Februari 2016
- Dessy Artina, “Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014-2019”, *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.1 Vol 23 Januari 2016
- Elly Kuntjorowati, “*Nyaman dan Tenang di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Comfortable and Peaceful at Budi Dharma Elderly Home Service*”, jurnal PKS, vol 16, No 2, juni 2017
- Herlina Lambert, “Protection Against Refoulement From Europe : Human Rights Law Comes to the Rescue”, *Cambridge University Press*, Vol 48 Maret 2019
- Hernadi Affandi, Tanggung Jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945”, Vol 1, No 2, Juni 2017
- Indang Trihandini, “*Potret Buram Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Indonesia*”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol 1, No 5, april 2007
- Joyce Chia & Justin Susan Kenny, “The Children of Mae La: Reflection on Regional Rulligee Cooperation” *Melbourine Journal of international law*, Vol 13 No.3 November 2012
- Kurniawan kunto yuliarso “ Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: menuju Democratic governance” *jurnal ilmu sosial dan politik* vol, no 3 maret 2005
- Lia Shafira Arlianty dkk, Analisis Relevansi Program Dan

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Christanugra Philip, Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional, Lex

Pelaksanaan Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung, Jurnal FamilyEdu, Vol 1, No 1, April 2015

Misnarniati, "Analisis situasi penduduk lanjut usia dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia", Jurnal ilmu kesehatan masyarakat, Vol 8, No 2, Juli 2017

Muhammad heikal daudy, "tanggung jawab Negara terhadap pelanggaran menyeluruh ranjau anti-personel di Indonesia dalam konflik bersenjata di Aceh" jurnal ilmu hukum, vol.2, no 60, agustus 2013

Nur Asmarani, "Teori Hak Asasi Manusia (HAM)" *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015

Nurus sa'ada, Menata Kehidupan Lansia: Suatu Langkah Responsif untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Lansia Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta)" , *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 9, No 2, Juli-Desember 2015

Oman Sukmana, " Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)" *Jurnal Sospol*, Vol 2, No.1, Juli-Desember 2016

Stefanus Mendes Kiik dkk, "Peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di depok dengan latihan keseimbangan", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 21, No 2, Juli 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU RI No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

D. Website

<http://www.kbknews.id/2017/02/25/dinsos-1-111-lansia-terlantar-di-jakarta/> diakses 20.00 wib, tanggal 18 September 2019

<http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-realibilitas-dan-validasi-dalam-metode-penelitian-komunikasi/20-12-20017>, diakses, tanggal, 01 Oktober 2019

<https://regional.kompas.com/read/2017/02/09/17465161/warga.lansia.eks.penghuni.panti.jompo.tunas.bangsa.meninggal.di.rs> diakses tanggal 21 februari 2020